



BORJUIS JAWA: TRANSFORMASI SOSIAL DI TENGAH KOLONIALISME ABAD XIX-XX

Irvan Tasnur^{1*}, Naufal Raffi Arrazaq², Fitra Widya Wati³

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo,
Gorontalo, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri
Makassar, Makassar, Indonesia

Email: ¹irvantasnur@ung.ac.id, ²naufalraffi@ung.ac.id, ³fitra.widya.wati@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kemunculan dan perkembangan kaum borjuis lokal di Jawa pada abad XIX hingga XX. Fokus utama penelitian adalah transformasi struktur kelas sosial akibat penerapan kebijakan ekonomi liberal oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya adalah memahami bagaimana konsep "borjuis" yang berasal dari konteks sosial-ekonomi Eropa diadaptasi dalam masyarakat Jawa. Metode yang digunakan adalah metode historis yang meliputi heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (validasi data), interpretasi data, dan historiografi (penulisan narasi sejarah), dengan pendekatan teori materialisme historis Karl Marx. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi liberal pada tahun 1870 memicu terbentuknya kelas sosial baru yang berbeda dari aristokrasi tradisional. Kelas borjuis Jawa muncul dari golongan priyayi rendah, seperti kepala desa, bangsawan tinggi, dan pedagang yang bertransformasi menjadi pengusaha. Meskipun menunjukkan perilaku ekonomi yang mirip dengan borjuis Eropa, borjuis Jawa tetap mempertahankan identitas lokalnya. Hingga awal abad XX, mereka memainkan peran penting dalam perekonomian dan pergerakan nasional.

Kata Kunci: Borjuis, Jawa, Kolonialisme, Ekonomi Liberal, Priyayi

ABSTRACT

This study examines the emergence and development of the local bourgeoisie in Java in the 19th to 20th centuries. The main focus of the study is the transformation of the social class structure due to the implementation of liberal economic policies by the Dutch colonial government. The aim is to understand how the concept of "bourgeois" originating from the European socio-economic context was adapted in Javanese society. The method used is the historical method which includes heuristics (collecting sources), source criticism (data validation), data interpretation, and historiography (writing historical narratives), with the approach of Karl Marx's historical materialism theory. The results of the study show that the implementation of liberal economics in 1870 triggered the formation of a new social class that was different from the traditional aristocracy. The Javanese bourgeois class emerged from the lower priyayi class, such as village heads, high nobles, and traders who transformed into entrepreneurs. Although showing economic behavior similar to the European bourgeoisie, the Javanese bourgeoisie maintained its local identity. Until the early 20th century, they played an important role in the economy and national movements.

Keywords: Bourgeoisie, Java, Colonialism, Liberal Economy, Priyayi

A. PENDAHULUAN

Peristiwa sejarah selalu dihiasi dengan typologi-typologi baru guna membatasi, membedakan dan memberi penjelasan terhadap sesuatu agar sifatnya lebih kongkret dan mudah diingat. Sebagai contoh kongkret yaitu dengan adanya pengistilaan kaum borjuis dan proletar, walaupun keduanya lahir pada saat yang bersamaan namun dalam segi arti mempunyai makna berbeda, dilihat dari segi tujuan pengistilahan ini dilakukan guna memisahkan pengertian tersebut berdasarkan unsur kekuatan, kepentingan dan pengaruh. Secara sederhana kaum borjuis dapat diartikan sebagai kalangan masyarakat yang memiliki faktor produksi atau dengan kata lain mereka memiliki modal (kapital), sedangkan kaum proletar adalah masyarakat pekerja atau buruh [1]. Lahirnya kedua pengistilaan ini tidak dapat dilepaskan dari revolusi industri di eropa, tepatnya istilah-istilah tersebut lahir sebagai dampak negatif dari meletusnya revolusi industri di Inggris yang secara tegas dijelaskan oleh Boehalke sebagai lahirnya “masyarakat mesin” [2]. Istilah keras yang disampaikan tersebut tentunya sangat bermakna untuk menjelaskan kondisi Eropa pada saat itu, Zaman keemasan atau kebangkitan Eropa nyatanya hanya menguntungkan bagi sekelumit orang (pemilik modal).

Gambaran kesenjangan akibat pengkotak-kotakan masyarakat kedalam dua kelas, bila ditelusuri telah terjadi diawal revolusi industri, tentunya kesenjangan tersebut akibat tidak adanya aturan-aturan pasti mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing golongan. Sebagai contoh kesenjangan di Eropa dapat dilihat dalam tradisi masyarakat Jerman pada abad ke IX, penindasan yang dilakukan oleh kaum borjuis dan didukung oleh gerejawan adalah suatu hal yang sifatnya lumrah, kaum proletar sebagai buruh sangat menderita akibat kemiskinan, serta dihisap tenaganya. Mereka juga bekerja tanpa adanya satupun peraturan UU yang memberikan jaminan sosial dan pembatasan waktu kerja [3].

Praktik-praktik inilah yang kemudian dibawah oleh para kolonialis ke negerinegeri jajahan mereka, seperti halnya Belanda melalui pemberlakuan Undang-undang Agraria. Agrarische Wet 1870 menjadi keran yang membuka masuknya liberaisme di Hindia Belanda, dampaknya pihak swasta memiliki superioritas penguasaan modal [4] dan bertransformasi menjadi kaum borjuis, sedangkan buruh menjadi golongan proletar yang kebanyakan merupakan masyarakat pribumi. Namun, uniknya dalam masyarakat Jawa kelas atas yang berciri khas feodal, sedikit demi sedikit juga mengalami perubahan ke arah yang mencirikan sifat-sifat borjuis, terutama ketika kelahiran golongan baru yang biasa disebut dengan istilah the new priyayi.

Fenomena lahirnya golongan "the new priyayi" sebagai representasi borjuis lokal menjadi sebuah dinamika sosial yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini menjadi penting karena makna borjuis tidak dapat digeneralisasi secara global, melainkan dipengaruhi oleh faktor historis, sosial, dan budaya yang berbeda di setiap wilayah. Dengan menggali lebih dalam proses terbentuknya kaum borjuis di Jawa, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian sejarah sosial serta memperkaya pemahaman tentang bagaimana struktur kekuatan ekonomi dan sosial terbentuk di masyarakat pascakolonial. Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk memahami dampak kolonialisme dan kapitalisme terhadap perubahan stratifikasi sosial di Indonesia, yang hingga kini masih berpengaruh dalam dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna borjuis di tanah Jawa, serta mencari lebih dalam

terkait proses lahirnya kaum borjuis khususnya di pulau Jawa dalam rentan abad IX-XX.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengkaji kemunculan dan perkembangan kaum borjuis lokal di tanah Jawa pada abad XIX hingga XX dengan pendekatan teori materialisme historis dari Karl Marx. Pendekatan ini dipilih karena teori materialisme historis menekankan bahwa perubahan sosial dan perkembangan sejarah ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi dan hubungan produksi [5]. Langkah pertama yang dilakukan adalah heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan, seperti dokumen arsip, artikel penelitian [6], dan buku untuk memahami konteks sosial-ekonomi Jawa selama periode kolonial Belanda. Langkah ini penting untuk mendapatkan data yang mendukung analisis tentang bagaimana struktur ekonomi kolonial memengaruhi pembentukan kelas borjuis lokal.

Selanjutnya, dilakukan kritik sumber, baik eksternal maupun internal, untuk memastikan keaslian dan kredibilitas data yang diperoleh. Kritik sumber eksternal melibatkan verifikasi keaslian dokumen, sedangkan kritik internal berfokus pada analisis isi dan interpretasi makna yang terkandung dalam sumber tersebut. Setelah data yang valid diperoleh, peneliti melakukan interpretasi dengan menggunakan teori materialisme historis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana dinamika kelas sosial, khususnya antara borjuis dan proletar, berkembang di masyarakat Jawa. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana perubahan struktur sosial dan ekonomi terjadi sebagai akibat dari penerapan kebijakan ekonomi liberal oleh pemerintah kolonial Belanda.

Teori materialisme historis relevan digunakan karena menitikberatkan pada hubungan antara basis ekonomi (mode of production) dan struktur sosial (superstruktur). Dalam konteks Jawa pada abad XIX hingga XX, kemunculan kaum borjuis lokal tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem produksi, masuknya modal asing, serta transformasi ekonomi agraris menjadi ekonomi berbasis perdagangan dan industri. Dengan demikian, teori ini membantu peneliti untuk memahami proses historis yang membentuk kesadaran kelas dan pola perjuangan sosial yang terjadi. Langkah terakhir adalah menyusun hasil analisis dalam bentuk historiografi, yaitu menulis narasi sejarah yang menggambarkan perkembangan borjuis lokal dan transformasi sosial yang terjadi. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan kelas sosial di Jawa dan bagaimana faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam proses tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah sosial-ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme yang membentuk dinamika masyarakat hingga saat ini. Pada masa penjajahan Belanda, terjadi perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Jawa, yang ditandai dengan munculnya kelas sosial baru, yaitu kaum borjuis lokal. Istilah "borjuis" dan "proletar," yang awalnya berasal dari konteks Eropa, mulai dikenal di tanah Jawa seiring dengan diterapkannya kebijakan ekonomi liberal oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad XIX. Kebijakan ini tidak hanya mengubah struktur ekonomi tetapi juga menggeser tatanan sosial tradisional yang sebelumnya hanya mengenal dua kelas utama: aristokrasi dan rakyat jelata.

Kemunculan kaum borjuis lokal sebagai kelas sosial baru menandai pergeseran kekuasaan ekonomi dari aristokrasi tradisional kepada mereka yang memiliki modal, tanah, dan akses terhadap jaringan ekonomi kolonial. Dalam konteks ini, kaum borjuis lokal memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi yang berlangsung selama periode kolonial, terutama melalui partisipasi mereka dalam sektor perdagangan dan pertanian komersial. Perubahan ini, bagaimanapun, tidak selalu sejalan dengan struktur sosial tradisional, sehingga menimbulkan dinamika sosial yang kompleks di masyarakat Jawa.

Makana Borjuis di Tanah Jawa

Istilah "Borjuis" telah banyak digunakan dalam berbagai konteks budaya dan sosial-ekonomi untuk menggambarkan kelas individu yang memiliki hak istimewa ekonomi serta modal budaya tertentu. Kelas ini seringkali diidentifikasi melalui kepemilikan aset, akses terhadap pendidikan, dan pengaruh dalam kehidupan sosial dan politik. Di Jawa, istilah "Borjuis" memiliki konotasi khusus yang mencerminkan lanskap sejarah dan sosial yang unik di wilayah tersebut. Sejarah kolonialisme, sistem feodal, serta perkembangan ekonomi kapitalistik memberikan makna tersendiri pada kemunculan kelas ini di masyarakat Jawa, yang berbeda dengan pemaknaan istilah tersebut di belahan dunia lain.

Masyarakat Jawa umumnya tidak mengenal istilah borjuis dan proletar sebagai pemisah antara kelas sosial. Istilah ini baru dipopulerkan ketika kemenangan partai liberalis di negeri Belanda, kemenangan ini berpengaruh besar terhadap perubahan struktur ekonomi kemasyarakatan di Hindia Belanda yang merupakan anak jajahan Belanda saat itu. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya kegagalan reformasi yang dicanangkan oleh partai liberal dengan penerapan sistem ekonomi liberal pada 1870 di Hindia Belanda [7], yang melahirkan berbagai permasalahan baru, satu diantaranya adalah lahirnya kelas-kelas ekonomi baru yang memperluas jurang pemisah khususnya bagi masyarakat pribumi. Sebelum Belanda masuk, sistem pemerintahan lokal yang berjalan di tanah Jawa adalah sistem kerajaan (monarki), sistem ini membagi golongan masyarakat kedalam beberapa kasta, bahkan ini tetap berlanjut pasca masuknya pengaruh islam hingga berdirinya kerajaan-kerajaan islam. Struktur ekonomi feodal yang berlangsung pada masa-masa tersebut, hanya membagi masyarakat kedalam dua kelas utama yaitu kaum ningrat atau yang biasa juga disebut priyai dan kelompok petani miskin.

Menurut Newberry kelas menengah atau pemilik tanah (borjuis) tidak terdapat di Indonesia dan kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara [8]. Hal ini kemudian dipertegas oleh Nagazumi dalam bukunya Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang, ia menganalisis bahwa munculnya kaum borjuis erat kaitannya, dengan ekonomi uang (kapital) sehingga dapat diabstraksikan bahwa sebelum diberlakukannya ekonomi liberal 1870, Indonesia belum tersentuh oleh pemisahan golongan (borjuis dan proletar) [9]. Setelah ekonomi liberal masuk pada tahun 1870, mulailah terjadi pergeseran signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi di Jawa. Pemberlakuan Undang-Undang Agraria yang memperbolehkan pemodal asing menguasai lahan pertanian lokal menciptakan ruang bagi munculnya kelas pemilik modal atau borjuis. Kaum borjuis ini, meskipun tidak sepenuhnya terbentuk dari kalangan lokal, memainkan peran penting dalam proses kapitalisasi ekonomi. Penguasaan atas tanah dan sumber daya alam mulai terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses modal, sedangkan golongan pekerja lokal terpinggirkan ke dalam kelas proletar.

Transformasi ini juga didorong oleh perkembangan perdagangan internasional yang semakin pesat di akhir abad ke-19. Banyak tanah pertanian yang sebelumnya diolah oleh petani-petani lokal diubah menjadi lahan-lahan komersial, terutama untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan karet. Dengan demikian, terbentuklah lapisan kelas yang baru, di mana kaum borjuis yang menguasai lahan dan modal memiliki peran dominan dalam mengendalikan roda perekonomian, sementara mayoritas rakyat jelata tetap berada di bawah tekanan sistem ekonomi yang semakin kapitalistik. Proses ini menandai awal dari struktur kelas sosial yang lebih kompleks di Indonesia, yang sebelumnya didominasi oleh hierarki feodal tanpa perbedaan kelas berdasarkan kepemilikan modal.

Pemberlakuan ekonomi liberal di Hindia-Belanda, perlahan namun pasti berhasil menggerus kekuatan-kekuatan priyai yang tidak dapat dikalahkan dengan sistem-sistem ekonomi sebelumnya. Namun, usaha Belanda menghilangkan dominasi priyai mengalami kendala terutama pada periode akhir masa tanam paksa tepatnya tahun 1865 yang mengatur jumlah aristokrat Belanda dengan aturan untuk setiap 12 juta penduduk harus terdapat maksimal 175 pegawai Belanda, aturan ini dilanggar oleh 69 bupati dengan mempekerjakan sebanyak 400 priyai dan ribuan kepala desa [10]. Dualisme ini menyebabkan pemerintah Belanda kesulitan untuk mengontrol priyai, maka dari itu ditahun yang sama pihak Belanda memiliki inisiatif untuk mendata para kepala desa sebagai golongan non-aristokrat namun usaha ini ditolak dan menimbulkan perlawanan golongan priyai. Posisi priyai yang merupakan suatu *pristise* tersendiri dikalangan masyarakat, serta lapisan dalam masyarakat jawa yang hanya mengenal dua golongan yaitu bangsawan (*Gusti*) dan masyarakat biasa (*Kawula*), menyebabkan para kepala desa dan bangsawan tidak ingin digeser kedudukannya karena dianggap sebagai suatu tindakan pelecahan terhadap nama baik dari kaum priyai.

Munculnya kaum borjuis di Jawa sebagai suatu penggolongan kemasyarakatan yang baru akibat dari ekonomi liberal, sebenarnya telah lama dijelaskan oleh kaum sosialis di Eropa. Karl Marx dalam konsep materialisme historisnya menjelaskan proses ekonomi kemasyarakatan dalam sejarah diawali dengan komunalisme, kemudian digantikan oleh kolonialisme atau sistem kerajaan yang bersifat feodal, dan berakhir pada industrialisasi atau masyarakat liberal. Pemberlakuan sistem ini menyebabkan perubahan lapisan masyarakat, Tuan tanah dan kerabat-kerabatnya berubah menjadi kaum kapital, sedangkan budak atau masyarakat jelata berubah menjadi kaum proletar [11]. Hal ini juga terjadi di zaman pemberlakuan liberalisme di Hindia Belanda, Baily menjelaskan bahwa setelah berlakunya ekonomi liberal muncul penggolongan baru dalam masyarakat jawa yaitu kaum borjuis (lebih sering disebut priyai) dan proletar atau rakyat jelata [10]. Secara umum penggolongan priyai yang dimaksud adalah golongan “priyai tradisional” dan “new priyai” yaitu mereka yang ikut bekerjasama dengan golongan swasta untuk menyukseskan sistem ekonomi liberal.

Kemunculan priyai-priyai baru sebenarnya bukanlah suatu hal yang mengherankan, liberalisme yang mengizinkan tanah untuk disewa oleh pengusaha-pengusaha swasta merupakan cikal bakal lahirnya golongan borjuis di tanah jawa. Mereka yang telah memiliki tanah yang luas khususnya kaum bangsawan tentunya memanen untung dengan pemberlakuan sewa tanah, gaji berupa tanah yang telah dikumpulkan sekian lama berupa menjadi pundi-pundi

uang, begitupun masyarakat yang memiliki tanah. Namun, borjuis-borjuis baru ini lahir dari mereka yang mengelola uang dengan baik, yaitu membuka usaha kecil-kecilan yang nantinya menjelma menjadi usaha yang besar. Tidak jarang kemunculan borjuis-borjuis baru juga disebabkan oleh faktor kecurangan dari kepala-kepala desa di daerah-daerah.

Faktor lain yang mempercepat kelahiran kaum borjuis Jawa yaitu pembukaan terusan suez pada tahun 1869 dan berkembangnya teknologi kapal uap semakin menambah cepat laju perekonomian di Hindia-Belanda. Pembukaan perkebunan-perkebunan baru, industrialisasi produk perkebunan, serta dibukanya infrastruktur-infrastruktur seperti jalan, kreta api dan lain sebagainya menjadi peluang tersendiri masyarakat pribumi khususnya yang memiliki modal untuk membuka usaha-usaha [12]. Tingginya harga jual hasil perkebunan juga dimanfaatkan oleh golongan priyai yang perlahan menjelma menjadi kaum borjuis untuk membuka lahan-lahan perkebunan milik pribadi hingga membangun industri dengan skala yang cukup besar.

Lahirnya Kaum Borjuis Jawa

Pengistilahan borjuis dan proletar lahir beriringan dengan penerapan ekonomi kapitalis di Hindia Belanda pada 1870. Pada awal penerapannya, kelompok Borjuis asing dalam menguasai hampir keseluruhan faktor-faktor produksi di Nusantara, namun seiring dengan berjalannya waktu, kaum pribumi mulai ikut terlibat dan mengambil bagian dalam perdagangan dengan pihak Belanda. Kebanyakan mereka yang melakukan kontak dagang berasal dari kepala-kepala desa dan priyai yang dahulunya mendapatkan gaji berupa lahan. Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua kepala-kepala desa maupun priyai tersebut kemudian menginvestasikan hasil penjualan tanahnya ke dalam usaha-usaha. Istilah borjuis tidak dikenali dalam kontur masyarakat Jawa secara penamaan, bahkan setelah diberlakukannya ekonomi liberal, umumnya mereka hanya menggunakan pengistilahan-pengistilahan yang sudah ada sebelumnya untuk memanasifestasikan mereka yang masuk dalam kategori kelas borjuis. Penamaan kaum bangsawan yang masuk dalam kategori borjuis di Jawa dapat berbeda di setiap wilayah karena mempertahankan penamaan lokalnya, walaupun mereka telah bertransformasi jadi golongan pengusaha, hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel 1.

Tabel 1. Nama-Nama Lain Kepala Desa di Berbagai Daerah (Pulau Jawa)

| Daerah | Nama Lain Kepala Desa |
|---------------------|------------------------------|
| Banten | <i>Jaro/Juragan</i> |
| Krawang | Mandor |
| Kabupaten-Kabupaten | Lurah, Kuwu |
| Priangan | Kuwu |
| Cirebon | Bekel, Kuwu |
| Tegal | Bekel, Lurah |
| Banyumas | Lurah |
| Pekalongan | Bekel, Lurah |
| Bagelan | Kurah |
| Semarang | Petinggi |
| Jepara | Petinggi |

| | |
|-------------|-----------------|
| Rembang | Bekel, Lurah |
| Madiun | Kepolo |
| Kediri | Petinggi, Lurah |
| Surabaya | Petinggi |
| Pasuruan | Petinggi |
| Probolinggo | Petinggi |
| Besuki | Petinggi |
| Banyuwangi | Kliwon |
| Madura | |

Sumber: Dua abad penguasaan tanah: pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa [13]

Semangat kewirausahaan kaum borjuis Jawa bukan hanya terdapat pada golongan priayi kelas bawah (kepala desa) akan tetapi juga dialami oleh priayi kelas atas, di Pulau Jawa semangat ini mulai bangkit kembali pada abad ke-19, sebagaimana yang dicontohkan oleh Mangkunegara IV yang mendobrak norma-norma tradisional untuk terjun ke dunia bisnis, sehingga mengubah lanskap ekonomi masyarakat Jawa, salah satu sektor yang digeluti oleh Mangkunegara IV adalah dengan mendirikan pabrik gula dengan skala yang cukup besar [14].

Selain dari kepala desa, priayi dan bangsawan kelas atas, kaum borjuis Jawa juga terlahir dari kelas yang telah lama menempati posisi sebagai kelas pedagang yang kemudian bertransformasi menjadi pengusaha yang memiliki kapital atau modal yang sangat besar. Salah satu pengusaha pribumi yang sangat di segani pada saat itu bernama Tasripin, ia merupakan seorang yang dilahirkan sebagai anak pedagang yang kemudian sukses mendirikan perusahaan pengelolaan kulit, rumah penjagalan dan es batu [15]. Hingga paruh awal abad ke XX Tasripin telah memiliki 10.000-15.000 orang pekerja [16]. Pada tahun 1919, Tasripin meninggal dunia dan meninggalkan harta yang bernilai 45 juta gulden [17].

Berbagai peristiwa tersebut menggambarkan bahwa, Kelahiran borjuis Jawa terjadi seiring penerapan ekonomi kapitalis di Hindia Belanda pada 1870, saat kaum pribumi mulai terlibat dalam sektor produksi yang sebelumnya didominasi borjuis asing. Priyayi, kepala desa, dan pedagang lokal bertransformasi menjadi pengusaha, seperti Mangkunegara IV yang memasuki industri gula, dan Tasripin yang sukses dalam industri kulit serta mempekerjakan ribuan orang. Meskipun istilah "borjuis" tidak digunakan secara langsung dalam konteks Jawa, kelas ini berkembang melalui partisipasi aktif dalam ekonomi modern dan akumulasi modal besar, menciptakan lanskap ekonomi baru di Jawa.

Kehidupan Borjuis Jawa dan Perkembangannya

Pada masa pemerintahan kolonial, kaum borjuis Jawa memiliki gaya hidup yang sangat mewah dalam segala hal. Isma'il dalam bukunya *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, menyebutkan bahwa kaum priyayi pada tahun 1895 mengadakan pesta keluarga secara besar-besaran dan tidak jarang mereka harus berhutang kepada rentenir hingga menyebabkan priyayi tersebut jatuh miskin (Isma'il, 1997: 73). Uniknya, salah satu simbolisasi posisi kaum borjuis Jawa dalam pesta-pesta tersebut dapat disaksikan dengan penggunaan undangan yang dicetak, sebagai penanda status sosial dan penanda kekuatan ekonomi golongan mereka dalam masyarakat [18].

Banyaknya kaum borjuis Jawa yang meminjam uang untuk keperluan konsumtif seperti pesta, dimanfaatkan sebagai sebuah peluang besar oleh kaum borjuis pribumi lain untuk membuka bank swasta guna memberikan pinjaman bagi mereka yang ingin mengadakan pesta besar-besaran dengan jumlah bunga yang kecil. Salah satu bank tersebut adalah De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pangreh Praja Berkebangsaan Pribumi) atau biasa disebut Bank Priayi) tanggal 16 Desember 1895 .

Menurut Geertz dalam perkembangan selanjutnya, kaum borjuis di nusantara terbagi menjadi dua yaitu borjuis santri dan borjuis abangan [19]. Berdasarkan analisisnya walaupun pedagang santri dalam kuantiti memiliki jumlah yang sangat kecil tetapi dari segi pendapatan, mereka mengantongi keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan pedagang abangan. Meskipun demikian status pedagang santri tidak dapat berubah menjadi priyai disebabkan oleh status kesantriannya. Namun dalam perkembangannya, pada akhir abad ke IX terdapat usaha golongan borjuis Jawa termasuk golongan Islam untuk mengambil bagian dalam perdagangan guna menggantikan dominasi borjuis China dalam perdangan-perdagangan eceran antar kota .

Untuk menjelaskan kaum borjuis khususnya mereka yang beragama muslim perlu kehati-hatian, terlebih sebutan borjuis lebih condong ke arah pengklasifikasian barat. Lombard menjelaskan bahwa terdapat persamaan yang umumnya terdapat pada kalangan borjuis barat dan borjuis pribumi yaitu: Mereka mengutamakan modal bergerak secara sengaja; Mereka kebanyakan tinggal di perkotaan dan mengembangkan budaya kota yang berbeda dari budaya kraton dan kebudayaan rakyat; Merupakan wahan suatu ideologi “nasional” yang sekaligus melawan kerajaan jenis tradisional dan segala persaingan ekonomi dari manapun datangnya [20].

Memasuki abad ke-20, perkembangan kaum borjuis pribumi, khususnya di Jawa, mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kaum borjuis ini, yang sebagian besar terdiri dari pengusaha kecil, mulai memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul meskipun mereka masih tertinggal jauh dari pengusaha Eropa dan Tionghoa. Peningkatan ini didorong oleh semangat swadaya, di mana para pengusaha pribumi membangun usaha dengan mengandalkan kemampuan dan jaringan mereka sendiri, tanpa banyak dukungan dari pemerintah kolonial. Van Mook, salah satu tokoh penting kolonial, memuji kemajuan ini, terutama karena para pengusaha Jawa berhasil membangun jaringan perdagangan antar-kota besar seperti Betawi, Cirebon, Purwokerto, Pekalongan, Surakarta, Semarang, Kediri, Surabaya, dan Tulungagung [21]. Jaringan perdagangan ini menandakan bahwa pengusaha pribumi Jawa, meskipun dalam skala kecil, sudah memiliki keterampilan organisasi yang kuat dan koneksi yang luas,

memungkinkan mereka untuk bersaing di pasar yang didominasi oleh pihak asing. Meskipun begitu, kaum borjuis Jawa ini masih berada di bawah bayang-bayang dominasi ekonomi kolonial yang lebih menguntungkan pengusaha Eropa dan Tionghoa. Namun, walaupun borjuis Jawa terus mendapatkan tekanan melalui kebijakan Belanda, mereka selalu dapat menyesuaikan diri dengan berinovasi dengan bisnis yang digeluti menyesuaikan perubahan lanskap ekonomi [7].

Tabel 2. Pajak Pendapatan Jawa dan Madura 1925, Penduduk Hindia Belanda yang Membayar Pajak Pendapatan (Termasuk Surakarta dan Yogyakarta)

| Pajak dalam Gulden (f) | Eropa | Timur Asing | Pribumi |
|---------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 2,700 - 3,000 | 2.771 | 1.166 | 760 |
| 3,000 - 3,500 | 3.921 | 1.504 | 763 |
| 3,500 - 4,000 | 3.779 | 1.178 | 516 |
| 4,000 - 4,500 | 3.295 | 832 | 336 |
| 4,500 - 5,000 | 3.027 | 642 | 253 |
| 5,000 - 6,000 | 4.729 | 817 | 261 |
| 6,000 - 7,000 | 3.607 | 549 | 183 |
| 7,000 - 8,000 | 2.720 | 373 | 117 |
| 8,000 - 9,000 | 2.057 | 252 | 43 |
| 9,000 - 10,000 | 1.753 | 178 | 38 |
| 10,000 - 12,000 | 2.204 | 260 | 20 |
| 12,000 - 15,000 | 1.764 | 207 | 26 |
| 15,000 - 20,000 | 1.491 | 188 | 64 |
| 20,000 - 25,000 | 580 | 95 | 16 |
| 25,000 - 30,000 | 319 | 49 | 3 |
| 30,000 - 35,000 | 187 | 26 | 3 |
| 35,000 - 40,000 | 112 | 27 | 3 |
| 40,000 - 50,000 | 134 | 31 | 3 |

Sumber: Hasil pengelolaan buku paradigma islam: interpretasi untuk aksi

Perkembangan perdagangan Borjuis Jawa selama masa kolonial Belanda juga dapat dilihat dari kontribusi mereka dalam pembayaran pajak. Data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah pajak dari penduduk pribumi, termasuk di Jawa, masih mendominasi dalam skala kecil dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan oleh orang Eropa dan Timur Asing. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun skala ekonomi mereka masih terbatas, keberadaan borjuis Jawa sudah mulai tampak dengan jelas. Pertumbuhan ini juga mencerminkan peran penting kaum borjuis Jawa dalam membentuk ekonomi lokal, meskipun mereka menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi yang dikendalikan oleh pihak asing.

Pada tahun 1925, jumlah pedagang pribumi, termasuk borjuis Jawa, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut terjadi baik dari kalangan borjuis Jawa (pribumi pada umumnya), Timur Asing dan Eropa, hal ini dapat diidentifikasi dengan diberlakukannya *Ordonantie op de vennootschapsblesting* oleh Belanda, peraturan perundang-undangan ini mengatur terkait pajak penghasilan bagi perkumpulan, perseroan, yayasan dan berbagai badan lainnya. Kaum borjuis Jawa mulai berperan sebagai kekuatan ekonomi baru, meskipun perkembangannya lebih lambat dibandingkan dengan kelompok lain, seperti Eropa dan Tionghoa. Selain menjadi kekuatan baru, Borjuis Jawa juga berperan sebagai salah satu motor penggerak dalam usaha pergerakan nasional Indonesia.

D. KESIMPULAN

Makna borjuis di Jawa memiliki perbedaan dengan konsep borjuis di Eropa. Di Eropa, istilah borjuis merujuk pada kelas sosial yang memiliki modal dan mengendalikan produksi industri, sementara di Jawa, borjuis lebih dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional yang sudah ada. Kelas borjuis Jawa tidak hanya

berkaitan dengan modal ekonomi, tetapi juga terhubung dengan posisi sosial dan budaya yang kuat di dalam masyarakat feodal.

Kelahiran kelas borjuis di Jawa sebagian besar dipicu oleh penerapan Agrarische Wet 1870, yang membuka pintu bagi modal asing untuk menguasai lahan pertanian. Kebijakan ini memfasilitasi peralihan ekonomi dari aristokrasi tradisional kepada mereka yang memiliki modal. Kepala desa yang dahulu menerima tanah sebagai kompensasi, perlahan-lahan menjadi pengusaha dengan memanfaatkan lahan untuk komoditas ekspor. Bangsawan kelas atas, seperti Mangkunegara IV, juga mulai terlibat dalam aktivitas komersial, mendirikan pabrik gula dan usaha lainnya. Selain itu, pedagang-pedagang lokal seperti Tasripin berkembang menjadi borjuis dengan membangun jejaring bisnis yang luas.

Kehidupan borjuis Jawa sangat muda diidentifikasi dari kebiasaan-kebiasaan hidup mewah, salah satunya dengan membuat pesta hajatan yang besar-besaran, dan berbagai simbolisasi yang mencerminkan kelas tersebut. Hingga awal abad ke XX, borjuis Jawa memegang peranan yang sangat penting bukan hanya dalam bidang ekonomi, akan tetapi juga dalam usaha pergerakan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Dugis, *Tori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press, 2018.
- [2] R. R. Boehlke, *Sejarah perkembangan pikiran dan praktek pendidikan agama Kristen: Dari Yohanes Amos Comenius hingga berkembang PAK di Indonesia*, vol. 2. BPK Gunung Mulia, 1997.
- [3] A. M. Suryanegara, *Api Sejarah 1*, vol. 1. Surya Dinasti, 2017.
- [4] I. Tasnur, J. Apriyanto, and N. R. Arrazaq, "Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi di Hindia Belanda (1870-1900)," *Kerat. J. Hist. Educ. Cult.*, vol. 4, no. 2, pp. 71–78, 2022.
- [5] A. N. Rahima, I. Tasnur, and M. Mahdalena, "Karl Marx dan Materialisme Historis dalam Telaah Filsafat Sejarah," *J. Kaji. Sos. Dan Budaya Tebar Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 7–13, 2021.
- [6] S. Helius, "Metodologi Sejarah," *Yogyakarta: Ombak*, 2007.
- [7] J. O. M. Broek, "The dutch east indies: its government, problems, and politics.," *Geogr. Rev.*, vol. 32, no. 2, p. 331, 1942.
- [8] J. Newberry, *Back door Java: negara, rumah tangga, dan kampung di keluarga Jawa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- [9] A. Nagazumi, *Indonesia dalam kajian sarjana Jepang:(perubahan social-ekonomi abad XIX & XX dan berbagai aspek nasionalisme Indonesia)*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- [10] C. A. Bayly and D. H. Kolff, *Two colonial empires: comparative essays on the history of India and Indonesia in the nineteenth century*, vol. 6. Springer Science & Business Media, 2012.
- [11] D. N. Wijaya, "Corak Humanisme dalam Serikat Buru Jawa Tahun 1926-1942," *J. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 28, no. 2, 2015.
- [12] S. Drakeley, *The history of Indonesia*. Bloomsbury Publishing USA, 2005.
- [13] S. M. P. Tjondronegoro and G. Wiradi, *Dua abad penguasaan tanah: pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*. Yayasan Obor Indonesia, 2008.

- [14] M. I. Birsyada, S. Wasino, S. Suyahmo, and H. Joebagio, "Bisnis Keluarga Mangkunegaran," *J. Penelit. Sos. dan Keagamaan Univ. Islam Negeri Walisongo Semarang*, vol. 1, 2016.
- [15] De Locomotief, "Ijefabriek," *De Locomotief*, Semarang, p. 6, 1910. [Online]. Available:
<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Tasripin&coll=ddd&identifier=ddd:010180297:mpeg21:a0040&resultsidentifier=ddd:010180297:mpeg21:a0040&rowid=9>
- [16] C. Amin and L. M. F. Purwanto, "Peran Tasripin pada Perkembangan Kampung Kota," *J. Tek. Sipil*, vol. 14, no. 2, pp. 25–37, 2021.
- [17] "Belangrijke Nalatenschap," *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, Batavia, p. 3, 1919. [Online]. Available:
<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Tasripin&coll=ddd&identifier=ddd:010180297:mpeg21:a0040&resultsidentifier=ddd:010180297:mpeg21:a0040&rowid=9>
- [18] D. Kristina and N. Saptaningsih, "Evolution in visual communication of the Javanese printed wedding invitations," *Humaniora*, vol. 31, no. 3, p. 315, 2019.
- [19] G. Clifford, "Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Kebudayaan Jawa," *Jakarta: Komunitas Bambu*, 2013.
- [20] D. Lombart, "Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu, Bagian II: Jaringan Asia," PT. Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole ..., 2005.
- [21] A. E. Priyono, *Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi*. PT Mizan Publika, 2008.